

**PENGARUH PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP
KEPUTUSAN PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN *TRANSFER PRICING***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Tergabung dalam
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014-2018)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**DWI WINDANARTI
NPM.1651030008
Program Studi : Akuntansi Syariah**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/ 2021 M

**PENGARUH PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP
KEPUTUSAN PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN *TRANSFER PRICING***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Tergabung dalam
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014-2018)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Perusahaan multinasional yang salah satu tujuannya untuk memperluas pangsa pasar ternyata memiliki permasalahan, salah satunya yaitu praktik *transfer pricing*. *Transfer Pricing* diindikasikan sebagai langkah strategis yang efektif dalam melakukan transaksi tentang pengaturan harga secara kompetitif oleh perusahaan-perusahaan yang berelasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji kembali pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014-2018. Jumlah populasinya sebesar 49 perusahaan dan jumlah sampel penelitian ini sebanyak 7 perusahaan dengan metode penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria Perusahaan Pertambangan yang Tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan presentasi kepemilikan 20% atau lebih dan Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban perpajakan sehingga alasan pajak menjadi tidak relevan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui mengakses www.idx.co.id. Analisis data menggunakan regresi data panel dan menggunakan alat bantu aplikasi *Eviews* versi 9 yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pemilihan model regresi data panel, dan uji hipotesis. Hasil analisis data atau regresi data panel menunjukkan bahwa secara simultan pajak dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai ETR (*effective tax rate*) dan presentase kepemilikan asing dalam suatu perusahaan bukan menjadi suatu tolak ukur dalam keinginan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing*, karena banyak hal yang perlu diperhatikan perusahaan mengingat bahwa aturan-aturan pemerintah mengenai *transfer pricing* semakin ketat. Variabel independen dapat menjelaskan pengaruh keputusan *transfer pricing* sebesar 4,36% sedangkan sisanya sebesar 95,64% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Transfer Pricing*, Pajak, Kepemilikan Asing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)
703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DWI WINDANARTI**
NPM : **1651030008**
Jurusan : **Akuntansi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PENGARUH PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014-2018)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 November 2020
Penulis,



Dwi Windanarti



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)
703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASING
TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN DALAM
MELAKUKAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris pada
Perusahaan Pertambangan yang Tergabung dalam Indeks
Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014-2018)**

Nama Mahasiswa : **Dwi Windanarti**

NPM : **1651030008**

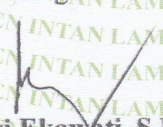
Jurusan : **Akuntansi Syariah**

Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I


Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si.
NIP. 197602022009122001

Pembimbing II


Dinda Fali Rifan, S.E., M.Ak.
NIP. 199307302018012001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah


Anv Eliza, M. Ak.
NIP. 198308152006042004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN TRANSFER**

PRICING (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Tergabung dalam

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014-2018)”, disusun oleh : **DWI**

WINDANARTI, NPM : 1651030008, Jurusan : **Akuntansi Syariah**, Telah di Ujikan dalam

sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada

Hari/Tanggal : **Senin, 21 Desember 2020.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Madnasir, S.E., M.Si.**

Sekretaris : **Dimas Pratomo, M. E**

Penguji I : **Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M**

Penguji II : **Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
NIP.198008012003121001

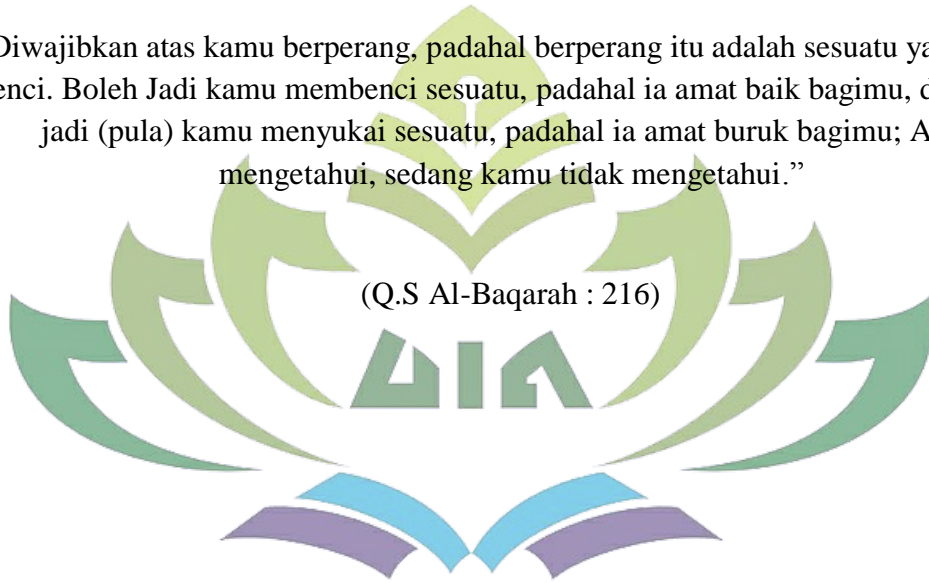
MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah : 216)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil Alamin, Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Skripsi ini penulis persembahkan kepada, kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ngadiono dan Ibu Rusmini yang tiada henti memberikan doa, semangat dukungan serta materil agar penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan tanggung jawab ini. Kepada yang tersayang Mba Umi Marsiyanti yang selalu mendoakan, membantu, menghibur, dan memberikan semangat agar skripsi ini dapat selesai.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Dwi Windanarti dilahirkan di Bandar Lampung, 25 Maret 1998. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Ngadiono dan ibu Rusmini. Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Jagabaya I Tanjung Karang Timur Bandar Lampung selesai pada tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Nusantara Bandar Lampung selesai pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

DWI WINDANARTI

NPM. 1651030008

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya kepada seluruh umat berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PENGARUH PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Tergabung Dalam Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2014-2018)”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut setia beliau.

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah mengarahkan penulis dan memberi ilmu serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Dinda Fali Rifan, M. Ak selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi ilmu serta motivasi penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data dan refrensi.
7. Sahabat seperjuangan sarjana ekonomi kelas A Akuntansi Syariah angkatan 2016 Abdul Manan, Abdul Munir, Ahmad Jian Sastra Ramadhan, Aiman Yadi, Endri Wibowo, M. Parid Zaki, Della Ayu Safitri, Destri Anggraini, Dina Pratiwi, Evita Veron, Lusiyana, Riami Amini Aru dan Shinta Tristia Hangayumi yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan, semangat dan bantuan dalam proses penulisan skripsi.
8. Sahabat seperjuangan keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 008 desa Sumber Jaya, Awaludin, Ahmad Jian, Muchtar, Pebri, Riki, St Aminah, Triga, Toni, Vina, Yunita dan Yurnita yang telah membantu memberi semangat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini Desy Hawani, Risna Wati, Indah Noviani dan lainnya terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberi masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

Bandar Lampung, 17 November 2020

Penulis



DWI WINDANARTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	4
D. Rumusan Masalah	17
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	20
1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	20
2. <i>Transfer Pricing</i>	22
a. Definisi <i>Transfer Pricing</i>	22
b. Motivasi <i>Transfer Pricing</i>	24
c. Metode <i>Transfer Pricing</i>	24
d. Hubungan Istimewa	27
e. Pengaturan Praktik <i>Transfer Pricing</i> di Indonesia.....	28
3. Pajak.....	32
a. Definisi Pajak.....	32
b. Fungsi Pajak.....	34
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	34
d. Definisi Pajak Penghasilan Badan	35
e. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	36
4. Kepemilikan Asing.....	38
5. Sistem Perpajakan dalam Islam	41
B. Tinjauan Pustaka	45
C. Kerangka Berpikir.....	51
D. Hipotesis.....	52

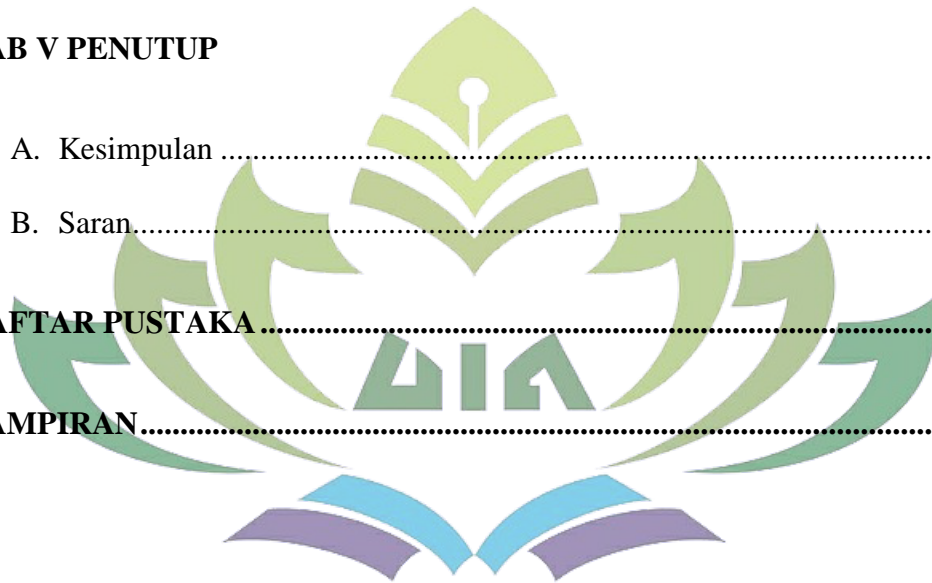
BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Populasi, Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel Penelitian	57
C. Definisi Operasional Penelitian.....	60
D. Metode Pengumpulan Data.....	62
E. Metode Analisis Data.....	62
1. Uji Statistik Deskriptif	62
2. Analisis Regresi Data Panel.....	63
3. Tahap analisis data.....	65
4. Uji asumsi klasik.....	67
5. Uji hipotesis	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	72
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	72
2. Hasil Pengujian analisis data.....	74
a. Uji Statistik Deskriptif	74
b. Tahap analisis data	75
c. Uji asumsi klasik.....	78
d. Analisis Regresi Data Panel	82
e. Uji hipotesis	83

B. Pembahasan.....	85
1. Hubungan pajak terhadap <i>transfer pricing</i>	85
2. Hubungan kepemilikan asing terhadap <i>transfer pricing</i>	89
3. Hubungan pajak dan kepemilikan asing terhadap <i>transfer pricing</i>	92
4. Pajak dan kepemilikan asing dan <i>transfer pricing</i> perspektif Ekonomi Islam.....	93
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	105



DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 3.1 Penentuan Jumlah Sampel Penelitian	59
Tabel 3.2 Sampel Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI	59
Tabel 4.1 Nama Perusahaan Pertambangan yang Tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2014-2018 yang digunakan sebagai Sampel Penelitian .	73
Table 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	74
Table 4.3 Hasil Uji Chow.....	76
Table 4.4 Hasil Uji Hausman.....	77
Table 4.5 Hasil Uji Lagrange Multiplier Test.....	78
Table 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	80
Table 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	81
Table 4.8 Hasil Uji Regresi Data Panel	82
Table 4.9 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	84
Table 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perkembangan kasus praktik <i>transfer pricing</i> tahun 2016-2018	9
Gambar 2 Kerangka berpikir.....	50
Gambar 3 Uji Normalitas	79



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian
- Lampiran 2 Tabulasi Variabel *Transfer Pricing*
- Lampiran 3 Tabulasi Variabel Pajak
- Lampiran 4 Variabel Kepemilikan Asing
- Lampiran 5 Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 7 Pemilihan Model Data Panel
- Lampiran 8 Uji Chow
- Lampiran 9 Uji Hausman
- Lampiran 10 Uji Lagrange Multiplier Test
- Lampiran 11 Uji Regresi Data Panel
- Lampiran 12 Contoh Transfer Pricing
- Lampiran 13 Contoh Pajak
- Lampiran 14 Contoh Kepemilikan Asing
- Lampiran 15 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, serta menghindari kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Judul skripsi “**Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014-2018)**”. Maka akan dijabarkan terlebih dahulu istilah-istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini.

1. Pajak merupakan sumbangan warga negara ke kas negara berlandaskan undang-undang, sehingga dalam pemungutannya bersifat memaksa dengan tanpa mendapat imbalan secara langsung. Pemerintah memungut pajak berdasarkan pedoman hukum yang telah ditetapkan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara demi tercapainya kesejahteraan warga Negara.¹

¹Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2.

2. Kepemilikan Asing adalah hak atas saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing atau yang berstatus luar negeri.²
3. *Transfer Pricing* adalah penentuan harga yang terkandung pada masing-masing produk atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.³

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul ini sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Perusahaan multinasional yang salah satu tujuannya untuk memperluas pangsa pasar ternyata memiliki permasalahan. Setidaknya terdapat tiga permasalahan yang dihadapi perusahaan multinasional, yaitu perbedaan budaya (*cultural difference*), *transfer pricing* dan nilai tukar mata uang (*exchange rate*).⁴

Transaksi yang terjadi dalam perusahaan multinasional tentunya akan melibatkan anggota grup dari berbagai divisi atau negara. Penentuan harga atas berbagai transaksi di perusahaan multinasional disebut dengan *transfer*

²Thesa Refgia, Vince Ratnawati, dan Rusli, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 4 No. 1 (2016), h. 543.

³Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo, "*Tax Minimization* Sebagai Pemoderasi Hubungan Antara *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism* Dan *Debt Covenant* Dengan Keputusan *Transfer Pricing*", *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 1 No. 1, (2018), h. 64.

⁴Adrian Sutedi, *Hukum...*, h.122.

pricing.⁵ Walaupun istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah *transfer pricing* sering diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser laba antar perusahaan dalam satu grup. Otoritas pajak menyebutkan, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak apabila penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak wajar dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.⁶

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Tersedia banyaknya referensi pendukung dari jurnal maupun skripsi, sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya dan bahan-bahan serta literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini tersedia di perpustakaan dan media sosial.

⁵Adrian Sutedi, *Hukum...*, h.123.

⁶Zerni Melmusi, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta *Islamic Indeks*, *Jurnal EKOBISTEK*, Vol. 5 No. 2 (2016), h. 1.

C. Latar Belakang

Globalisasi yang terjadi saat ini membawa berbagai dampak di segala bidang, salah satunya pada perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis. Globalisasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan antarnegara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber daya manusia antarnegara.⁷ Globalisasi ekonomi membawa dampak semakin berkembangnya transaksi internasional.⁸

Kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha mereka dengan membuka cabang dan anak perusahaan di berbagai negara di dunia, yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategi dan menumbuhkembangkan pangsa pasar (*market share*). Para pemilik bisnis membentuk perusahaan multinasional melalui anak perusahaan dan cabang perusahaan untuk mengembangkan bisnis di beberapa negara dengan melakukan berbagai investasi dan transaksi yang berskala internasional.⁹

⁷Machfirah Aplilia Rezky dan Fachrizal, “Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Multinationality* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*”, *JIMEKA*, Vol. 3, No. 3 (2018), h. 401.

⁸Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari, “Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunnelling Incentive* Dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Memiliki Hubungan Istimewa”, *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 3 No. 2 (2018), h. 64.

⁹*Ibid.*, h. 64.

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berkedudukan di negara asal namun memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara di dunia¹⁰. Alasan utama yang mendorong munculnya perusahaan multinasional adalah untuk memperluas pangsa pasar, pencarian sumber bahan baku, pencarian teknologi baru, mencapai efisiensi, menghindari peraturan atau kebijakan pemerintah serta diversifikasi.¹¹ Berkembangnya korporasi multinasional tentu membawa permasalahan khusus yang akan dihadapi oleh perusahaan, yaitu perbedaan budaya (*cultural difference*), *transfer pricing* dan nilai tukar mata uang (*exchange rate*).¹²

Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota atau divisi, salah satunya ialah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi diantara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut dikenal dengan sebutan *transfer pricing*/ harga transfer.¹³ *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.

¹⁰Irham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 254.

¹¹Adrian Sutedi, *Hukum...*, h.122.

¹²*Ibid.*, h.122.

¹³Anita Wahyu Indrasti, "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, *Bonus Plan* Dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*", *PROFITA*, Vol. 9 No. 3 (2016), h. 348.

Transfer pricing diindikasikan sebagai masalah utama dalam perpajakan yang dihadapi oleh korporasi multinasional.¹⁴ Motivasi *transfer pricing* di Indonesia terkait dengan beberapa hal yaitu pengurangan objek pajak terutama pajak penghasilan, pelanggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri, penurunan pengaruh depresiasi rupiah, menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor, mempertahankan sikap *low profile* tanpa mempedulikan tingkat keuntungan usaha, mengamankan perusahaan dari tuntutan atas imbalan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan, memperkecil akibat pembatasan dan resiko bisnis di luar negeri.¹⁵

Hubungan Istimewa akan timbul dalam lingkungan korporasi multinasional dimana transaksi terjadi antar sesama divisi dalam perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya perilaku praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak, karena dilakukan dengan pihak berelasi maka penetapan harga dapat terjadi secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan cara menaikkan harga atau menurunkan harga.¹⁶ Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk melakukan perencanaan pajak dengan melakukan *transfer pricing* dengan memindahkan keuntungan yang didapat ke perusahaan

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum...*, h.123.

¹⁵ *Ibid.*, h. 123.

¹⁶ Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari, "Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunnneling Incentive...*, h. 64.

yang masih dalam satu grup di negara lain, sehingga total pajak perusahaan multinasional menjadi rendah.¹⁷

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien, tujuan utamanya adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal. Dalam *tax planning* ada tiga macam cara yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghematan pajak (*tax saving*).¹⁸

Penghindaran pajak dapat terjadi dengan berbagai faktor pendorong salah satunya adalah adanya negara-negara yang menerapkan tarif pajak sangat rendah atau *tax haven*, sehingga dapat mengakibatkan korporasi multinasional berinvestasi ke negara *tax haven*. Faktor lain yang juga dilakukan perusahaan dalam tujuannya untuk menghindari pajak adalah praktek *transfer pricing*. *Transfer pricing* digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi.¹⁹ *Transfer Pricing* merupakan salah satu skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk penghindaran pajak dalam konteks perpajakan

¹⁷Yenni Mangoting, "Aspek Perpajakan...", h. 72.

¹⁸Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 14.

¹⁹Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan, "Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak", *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 6 No. 2, (2018), h. 106.

internasional.²⁰ Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut.²¹

Dalam menghadapi skema untuk penghindaran pajak, pemerintah suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus dan umum. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi transaksi yang bertujuan untuk penghindaran pajak.²² Di Indonesia *transfer pricing* diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Peraturan tersebut memuat beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam transaksi yang tidak wajar.²³

Ketidaksiapan oleh negara-negara dalam mengantisipasi perkembangan bisnis global ini akan menyebabkan terjadinya bias dan *loop hole* dalam aturan pengenaan pajak. Akibat dari hal ini adalah terjadinya peluang *base erosion and profit shifting* (BEPS) atau pengalihan keuntungan yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk tidak membayar pajak atau membayar pajak namun dalam jumlah yang kecil.²⁴ Peluang *base erosion and*

²⁰Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, *Transfer Pricing: Ide, Strategi dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*, (Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 2013), h. 14.

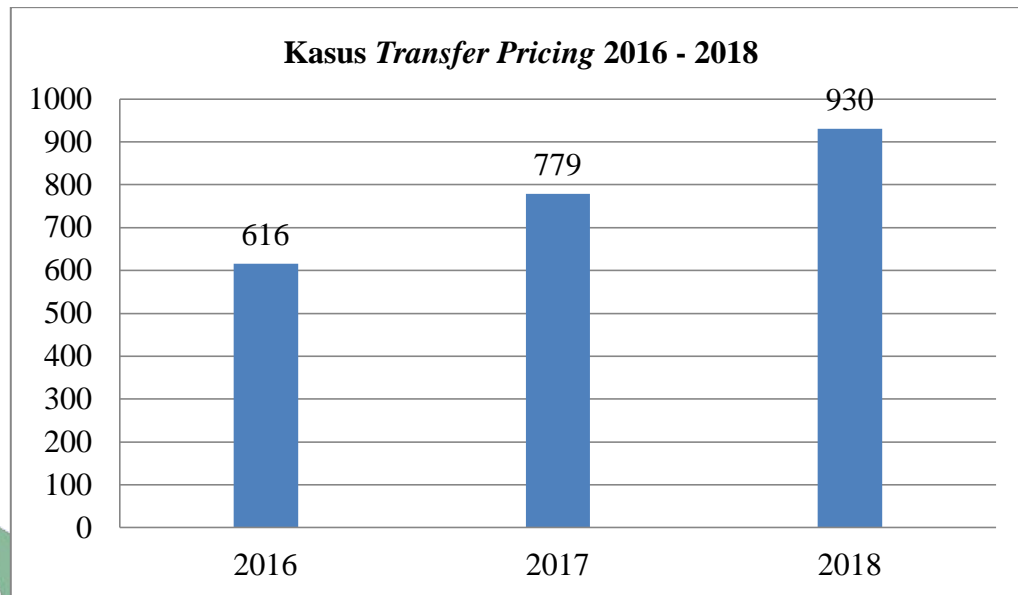
²¹ Zerni Melmusi, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Terhadap *Transfer Pricing*...", h. 1.

²²*Ibid.*, h. 14.

²³Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 18

²⁴Wika Arsanti Putri, "Prinsip Kewajaran Dan Dokumen Sebagai Penangkal Kecurangan", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 6 No. 1 (2018), h. 6.

profit shifting (BEPS) ini dapat mengakibatkan kasus praktik *transfer pricing* setiap tahunnya semakin meningkat. Berikut ini data perkembangan kasus praktik *transfer pricing* dari tahun 2016 – 2018 :



Gambar 1
Perkembangan kasus praktik *transfer pricing* tahun 2016 – 2018

Sumber: diolah dari data Organisation for Economic Co-operation and Development (2018)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui kasus *transfer pricing* setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 616 kasus kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 26% menjadi 779 kasus. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengungkapkan dalam *The 2018 Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistic* bahwasanya kasus *transfer pricing* setiap tahun semakin meningkat, dibandingkan 2017 kasus *transfer pricing* naik hampir 20% menjadi 930 kasus

pada tahun 2018. Dengan rata-rata waktu penyelesaian lebih banyak sekitar 33 bulan atau lebih lama dari tahun sebelumnya 30 bulan.²⁵

Praktik *transfer pricing* sering dilakukan dengan cara memperkecil harga jual dan memperbesar harga beli dan antara perusahaan dalam satu grup dan mengalihkan keuntungan yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak dalam suatu Negara maka akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing*.²⁶

Selain alasan pajak, praktik *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak (*non tax motive*) yaitu kepemilikan asing. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berkedudukan di negara asal namun memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara di dunia.²⁷ Perusahaan multinasional merupakan sumber dari penanaman modal asing langsung yang tentu investasinya didominasi oleh kepemilikan asing. Hal ini sejalan dengan motivasi perusahaan

²⁵Organisation for Economic Co-operation and Development Rilis Statistik MAP 2018, “Kasus Baru Transfer Pricing Terus Naik”. DDTC Indonesia, 16 September 2019

²⁶Nurul Julaikah, “Hampir Semua Perusahaan Asing Akali Bayar Pajak”. *Merdeka.com*, 18 Maret 2014

²⁷Irham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan...*, h. 254.

melakukan *transfer pricing* yang salah satunya yaitu pelanggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri.²⁸

Sebagian besar perusahaan di Asia mempunyai struktur kepemilikan yang terpusat.²⁹ Dalam struktur kepemilikan yang terpusat, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali atau saham biasa sehingga pemegang saham pengendali dapat menyalahgunakan hak kendalinya untuk kesejahteraannya sendiri.³⁰

Pemegang saham pengendali menurut PSAK No.15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing.³¹ Ketika kepemilikan saham didominasi oleh pemegang saham pengendali asing, maka pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*.

Perusahaan multinasional yang investasinya didominasi oleh kepemilikan asing di negara sumber seperti Indonesia, sebagian besar terjadi di sektor

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum...*, h.123.

²⁹ Anita Wahyu Indrasti, "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing...", h. 349.

³⁰ Zerni Melmusi, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Terhadap *Transfer Pricing*...", h. 2.

³¹ *Ibid.*, h. 2.

pertambangan.³² Hal ini disebabkan perusahaan pertambangan di Indonesia, banyak dikontrol oleh negara asing karena adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia Indonesia, teknologi dan pendanaan untuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut sehingga harus memanfaatkan sumber dari luar negeri.³³

Sektor pertambangan diindikasikan merupakan sektor yang paling rawan terhadap manipulasi *transfer pricing*, karena didominasi oleh kepemilikan asing dan mempunyai kaitan intern perusahaan yang cukup substansial dengan perusahaan luar negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bisnis.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun yang diduga sebagai dampak dari manipulasi praktik *transfer pricing*.³⁴

Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil tentang pajak, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang

³² Azim Novriansa, “Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi *Transfer Pricing*”. *DDTC Indonesia*, 14 Oktober 2019

³³ Rita Purnamasari, “Sumber Daya Alam (SDA) Kita Dikuasai Negara Asing”. *Kompasiana*, 20 Oktober 2019

³⁴ Edi Suwiknyo, “Potensi Penerimaan Negara: Sektor SDA Rawan Praktik Pelanggaran”. *Bisnis.com*, 30 Juli 2019

*diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.*³⁵

Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa *jizyah* itu tidak dipungut kecuali dari orang-orang Ahli Kitab dan misalnya seperti orang-orang Majusi. Pendapat ini dianut oleh Imamasy-syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayatnya yang masyhur.³⁶ Sedangkan Abu Hanifah berpendapat *jizyah* dipungut dari semua non muslim yang bukan Arab, kecuali dari orang-orang Ahli Kitab. Sementara Imam Malik berpendapat bahwa diperbolehkan memungut *jizyah* dari semua orang kafir, Ahli Kitab, Majusi, penyembah berhala dan lain-lain.³⁷

Dari ayat di atas dijelaskan pada masa pemerintahan Rasulullah *jizyah (pajak)* sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan islam sebagai bayaran jaminan keamanan dan ketika *jizyah (pajak)* tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, *tabi'in* hingga sekarang berbeda pendapat didalam menyikapinya. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya.³⁸

Menurut para ulama diperbolehkan untuk memungut pajak dengan alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), h. 119.

³⁶ M. Abdul Ghofar E M, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 4*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), h. 138.

³⁷*Ibid.*, h. 138.

³⁸Dicki Hartanto, *Manajemen Keuangan Perusahaan Tinjauan Integratif*, (Pekanbaru: CV. MPS, 2014), h. 110.

itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah *ushulfiqh* menyebutkan bahwa: *Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib).³⁹

Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* terjadi karena adanya permainan harga antara perusahaan terafiliasi, di mana harga yang berlaku di antara mereka berbeda dengan harga pasar. Harga tersebut memang dirancang sedemikian rupa untuk tujuan mengalihkan keuntungannya ke cabang perusahaannya yang berada di *tax-haven country*, sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil.⁴⁰ Jika transaksi rekayasa untuk penghindaran pajak pada *transfer pricing* dalam menaikkan-turunkan harga baik pada harga penjualan (*ekspor*) dan harga pembelian (*impor*) terjadi, ini tergolong perbuatan yang zalim, karena telah merugikan pemerintah.

Pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya kecil. Dampak yang ditimbulkan dari transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* memang tidak merugikan sesama pelakunya (pihak penjual dan pembeli), karena harga tersebut memang sudah dibicarakan dan disepakati oleh mereka,

³⁹Dicki Hartanto, *Manajemen Keuangan...*, h. 119.

⁴⁰Ria Achmadiyah, "Transaksi Rekayasa Pajak Pada *Transfer Pricing* Menurut Hukum Islam", *Jurnal Maliyah*, Vol. 3 No. 2 (2013), h. 716.

tetapi membawa dampak yang merugikan bagi pemerintah, yaitu berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.⁴¹

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90 yang menerangkan tentang perintah untuk menjauhi perbuatan zalim dan arogansi di dalam kehidupan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾

Artinya :

*”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*⁴²

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia memerintahkan hamba – hamba Nya untuk berbuat adil, yakni mengambil sikap tengah dan penuh keseimbangan, serta menganjurkan untuk berbuat kebaikan.⁴³ Dapat diartikan bahwa *transfer pricing* tidak diperbolehkan jika dilakukan untuk perbuatan yang zalim seperti penghindaran pajak, yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

Dalam penelitian ini, subjek yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Salah satu

⁴¹Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari, “Pajak, *Tunneling Incentive* Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan *Transfer Pricing*”, *El-Muhasaba*, Vol. 6 No. 2 (2015), h. 163.

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, h. 277.

⁴³M. Abdul Ghofar dan Abdurrahim Mu'thi, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 5*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), h. 96

parameter kinerja pasar saham syariah di Indonesia adalah ISSI. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Konstituen ISSI akan diseleksi kembali sebanyak dua kali setahun.⁴⁴

Dengan adanya *review* ini, emiten dalam ISSI telah dipastikan oleh OJK tidak memiliki portofolio yang tidak halal, karena salah satu kriteria pemilihan saham syariah adalah emiten tidak menjalankan bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian, bank dan perusahaan pembiayaan yang berbasis bunga, bisnis minuman beralkohol dan bisnis yang menjalankan unsur suap.⁴⁵ Sehingga penelitian ini menggunakan subjek perusahaan pertambangan yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) agar sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan rentang data 5 tahun karena pada tahun 2016-2018 terjadi kenaikan kasus *transfer pricing* yang cukup signifikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014-2018)”.

⁴⁴Wihdan, ”Apa itu Indeks Saham Syariah (ISSI)” . *Republika*, 27 November 2019.

⁴⁵Monica Wareza, “Mengenai Lebih Dekat Indeks Saham Syariah”. *CNBC Indonesia*, 25 Februari 2018

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing*?
2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing*?
3. Bagaimana pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing*?
4. Bagaimana pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing* dalam Perspektif Islam?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian dilakukan bertujuan untuk menemukan, menguji serta mengembangkan suatu pengetahuan. Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pajak terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing*.

- c. Untuk mengetahui pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing*.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing* dalam Perspektif Islam?

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait dimana manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan penelitian selajutnya dan menambah ilmu pengetahuan bagi perkembangan studi bidang akuntansi dan perpajakan dengan memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing*.
- 2) Masyarakat, sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan akuntansi, khususnya mengenai Pajak, Kepemilikan Asing dan *Transfer Pricing*.
- 3) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan terutama mengenai Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing*.

b. Manfaat Praktis

1) Regulator, dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang berhubungan dengan pentingnya pengawasan serta efektifitas peraturan yang telah dikeluarkan mengenai Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing* di Indonesia. sehingga dapat meminimalisir kecurangan maupun penyelewengan terhadap kebijakan harga transfer di Indonesia.

2) Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing* di Indonesia. Sehingga dapat membantu suatu pengambilan keputusan dan menambah kesadaran akan pentingnya etika bisnis di perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan mengenai kontrak antara prinsipal, yaitu pihak yang mempekerjakan pihak lain yang disebut dengan agen yang melibatkan pendelegasian pembuatan keputusan. Teori keagenan juga merupakan suatu teori ekonomi yang melatarbelakangi adanya perbedaan konflik kepentingan dalam perusahaan atau organisasi.⁴⁶

Teori keagenan mengungkapkan hubungan antara dua pihak yaitu, pihak agen dan pihak prinsipal, dimana dalam hal ini pihak agen adalah manajer perusahaan atau dewan direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan dan pihak prinsipal, yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mengevaluasi informasi maupun mengelola jalannya perusahaan. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa, prinsipal

⁴⁶Michael C. Jensen and William H. Meckling, *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3. (1976).

mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.⁴⁷

Teori agensi memperkirakan adanya perbedaan keinginan antara manajemen dengan pemegang saham yang mengakibatkan adanya permasalahan, dimana manajer lebih memprioritaskan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri dibandingkan dengan keuntungan dari pemegang saham.⁴⁸ *Transfer pricing* dipengaruhi oleh faktor yang merupakan cerminan dari ketidakseimbangan informasi yang diperoleh antara manajemen level atas dari perusahaan dan dari manajer divisi seperti standarisasi produk, investasi asing, dan perbedaan pajak antar divisi.⁴⁹

Pada kasus *transfer pricing* dapat terjadi jika terdapat transaksi antar entitas bisnis yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini menjadi peluang transaksi dengan entitas terkait yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, hal ini sesuai dengan teori agensi. Pada perusahaan tertentu yang memiliki banyak divisi dalam satu grup tentu akan memiliki berbagai kepentingan yang bertentangan dengan berbagai tugas yang berbeda. Hal ini dapat membuat pemegang saham menjadi rugi, hal ini dikarenakan pemegang saham tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan

⁴⁷ Anthony and Govindarajan, *Management Control System*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 45.

⁴⁸ Chen, C. X., Lu, H., dan Sougiannis, T. "The Agency Problem, Corporate Governance, and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs.) *Contemporary Accounting Research*, 29(1) 2012. h. 252.

⁴⁹ Chen, C. X., Lu, H., dan Sougiannis, T. "The Agency Problem, Corporate Governance..., h. 255.

sehingga berkaitan dengan praktek *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan.⁵⁰

2. *Transfer Pricing*

a. Definisi *Transfer Pricing*

Menurut OECD (*Organization For Economic Cooperation and Development*), *transfer pricing* adalah: “Price at which a company undertakes any transactions with associated enterprise. When a company transfer goods, intangible property or services to a related company, the prices charged is defined as a transfer price.”⁵¹

Transfer pricing dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak dalam perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam praktek bisnis, *transfer pricing* dilakukan perusahaan multinasional yang berada satu grup dengan perusahaan tersebut.⁵²

Transfer Pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, aset tak berwujud, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba

⁵⁰Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah, “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* Dan *Exchange Rate* Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan”, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol. 18 No. 2, (2014), h. 162.

⁵¹*Organization for Economic Co-operation and Development*. “*Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration*” (Paris France: OECD, 2010).

⁵²Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, *Transfer Pricing: Ide, Strategi . . .*, h. 9.

perusahaan.⁵³ *Transfer pricing* adalah harga atau nilai jual khusus yang digunakan perusahaan dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*).⁵⁴

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.⁵⁵ Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi afiliasi, sedangkan pihak afiliasi tersebut diartikan sebagai pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak.⁵⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu keputusan mengenai penentuan harga atas transaksi barang dan jasa kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba sesuai dengan prinsip kewajaran.

⁵³Zerni Melmusi, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus...", h 3.

⁵⁴Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan, "Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, Vol. 15 No. 1 (2019), h. 50.

⁵⁵Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

⁵⁶Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/ atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaanya.

b. Motivasi *Transfer Pricing*

Motivasi *transfer pricing* di Indonesia terkait dengan beberapa hal antara lain:⁵⁷

- 1) Pengurangan objek pajak, terutama pajak penghasilan,
- 2) Pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri,
- 3) Penurunan pengaruh depresiasi rupiah,
- 4) Memperkuat tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor,
- 5) Mempertahankan sikap *low profile* tanpa mementingkan tingkat keuntungan usaha,
- 6) Mengamankan perusahaan dari tuntutan atas imbalan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan, dan
- 7) Memperkecil akibat pembatasan dan resiko bisnis di luar negeri.

c. Metode *Transfer Pricing* dan Penentuan Harga Pasar Wajar (*Arm's Length Price*)

Secara umum terdapat 5 (lima) metode *transfer pricing*, antara lain:⁵⁸

1) *Comparable uncontrolled price method* (CUP)

Comparable uncontrolled price method (CUP) atau metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Hukum...*, h.123.

⁵⁸ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan...*, h. 428.

istimewa adalah metode penentuan harga transfer, yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi, yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan sebanding.

2) *Resale Price Method* (RPM)

Resale Price Method (RPM) atau metode harga penjualan kembali adalah metode penentuan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset, dan resiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

3) *Cost Plus Method* (CPM)

Cost plus method (CPM) atau metode biaya-plus adalah metode penentuan harga transfer, yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor yang wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

4) *Profit Split Method (PSM)*

Profit split method (PSM) atau metode pembagian laba adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*transactional profit method based*). Dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi, dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi (*contribution profit split method*) atau metode sisa pembagian laba (*residual profit split method*).

5) *Transactional Net Margin Method (TNMM)*

Transactional net margin method (TNMM) atau metode laba bersih transaksional adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang

dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menentukan harga pasar wajar (*Arm's Length Price*). Tujuan dari metode-metode tersebut adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa telah memenuhi harga pasar wajar dengan konsisten.⁵⁹

d. Hubungan Istimewa

Praktik *transfer pricing* dapat terjadi jika perusahaan melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Pengertian hubungan istimewa diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, cakupan hubungan istimewa terjadi apabila:⁶⁰

1. Ada penyertaan kepemilikan secara langsung maupun tak langsung minimal 25% pada Wajib Pajak lainnya.
2. Wajib pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁵⁹Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 25.

⁶⁰Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4).

3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Penyesuaian 2015), pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh yang signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan.⁶¹ Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan terlebih dahulu.

e. Pengaturan Praktik *Transfer Pricing* di Indonesia

1. Undang-undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Dalam Hukum Positif di Indonesia ketentuan *transfer pricing* secara umum diatur dalam Pasal 18, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPH). Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai

⁶¹Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7. Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya- plus, atau metode lainnya.⁶²

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyebutkan dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.⁶³

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

⁶²Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3).

⁶³Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pasal 10 ayat (1) dan (2).

Transfer Pricing diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*). Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Dalam Peraturan tersebut, dikatakan bahwa Harga Wajar atau laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.⁶⁴

Dalam mengidentifikasi penerapan Prinsip dan Kelaziman Usaha yang dilakukan Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan istimewa dilakukan dengan sebuah analisis. Dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak

⁶⁴Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pasal 1 Angka (6).

mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.⁶⁵

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Atas dasar peraturan tersebut di atas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, mewajibkan semua pihak baik domestik maupun luar negeri yang melakukan transaksi afiliasi untuk menerapkan *Arm's Length Principle*.⁶⁶ Praktik *Transfer Pricing* erat kaitanya dengan Hubungan Istimewa antar wajib pajak. Ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016, menyebutkan bahwa Penentuan Harga Transfer adalah penentuan harga dalam Transaksi Afiliasi.⁶⁷ Transaksi Afiliasi yaitu transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi, dan Pihak Afiliasi dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan yaitu sebagai pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan

⁶⁵Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran..., Pasal 1 Angka (7).

⁶⁶Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pasal 3 Angka (3).

⁶⁷Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan..., Pasal 1 Angka (5).

Wajib Pajak.⁶⁸ Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak.⁶⁹

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan, pajak adalah sumbangan wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷⁰

Pajak adalah kontribusi rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁷¹ Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

⁶⁸Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan..., Pasal 1 Ayat (3) dan (2).

⁶⁹Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan..., Pasal 1 Ayat (6).

⁷⁰Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1).

⁷¹Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2013), h. 5.

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷²

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.⁷³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan kepada suatu negara dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan maupun kesejahteraan masyarakat luas.

⁷²Zerni Melmusi, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus...", h 3.

⁷³Siti Khusnul Khotimah, "Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan *Transfer Pricing*", *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol. 1 No. 1 (2018), h. 38.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi menjadi dua berdasarkan hasil dari pemungutan pajak, yaitu⁷⁴:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Berfungsi sebagai sumber pendapatan negara atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah untuk pengeluaran Negara.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Berfungsi sebagai pengaturan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam suatu Negara dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:⁷⁵

1) *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini pula utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan fiskus dan pajak.

⁷⁴Mardiasmo, *Perpajakan...*, h. 1.

⁷⁵ Mardiasmo, *Perpajakan...*, h. 7.

2) *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem ini sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materil, artinya utang pajak timbul apabila terdapat penyebab yang menimbulkan utang pajak.

3) *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

d. Definisi Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Perpajakan, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁷⁶

e. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

1) Penetapan Penghasilan Kena Pajak

Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sementara itu, untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto.

Penghasilan kena pajak (WP badan) = penghasilan neto

Adapun biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan PKP tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan tersebut didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun.⁷⁷

⁷⁶Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (3).

⁷⁷Dwi Sunar Prasetyo, *Panduan Lengkap Tata Cara dan Perhitungan Pajak Penghasilan*, (Yogyakarta: Laksana Resmi Siti, 2013), h.

2) Ketentuan Tarif PPh Badan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:⁷⁸

- a) Berbentuk perseroan terbuka.
- b) Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- c) Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal.

⁷⁸*Ibid.*,

4. Kepemilikan Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) sekarang ini semakin ramai dibicarakan, mengingat bahwa untuk menunjang kelangsungan pembangunan nasional membutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak mungkin mencukupi dari pemerintah dan swasta nasional. Keadaan inilah yang semakin mendorong untuk mengupayakan semaksimal mungkin menarik penanaman modal asing ke Indonesia.⁷⁹

Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi tuntutan globalisasi di bidang investasi adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Manives/Ka BKPM Nomor 15 tahun 1994. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah memberikan kemudahan dan kebebasan yang lebih besar terhadap kegiatan penanaman modal antara lain :⁸⁰

- a. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat berbentuk usaha patungan antara modal asing dengan warga negara Indonesia atau langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh pihak luar negeri.
- b. Penjualan saham perusahaan PMA kepada pihak Indonesia berdasarkan kesepakatan.

⁷⁹Syprianus Aristeus, *Penelitian hokum tentang peranan hokum investasi di Indonesia dalam era globalisasi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), h. 70.

⁸⁰Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

- c. Bagi sembilan bidang usaha yang tergolong penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup masyarakat yaitu pelabuhan, produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum seperti telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan media masa, perusahaan PMA yang dibentuk harus merupakan perusahaan patungan.
- d. Pembebasan batas minimal jumlah investasi yang akan ditanamkan.
- e. Persyaratan investasi ditiadakan bagi perusahaan PMA, kecuali dalam jumlah presentase yang kecil.
- f. Perusahaan PMA baik yang patungan maupun yang telah mendapat izin sebagaimana badan hukum di Indonesia, sehingga diperkenankan mendirikan perusahaan baru sebagaimana perusahaan PMA dengan patner asing baru.
- g. Pembelian saham nasional yang telah atau belum berproduksi komersial, badan asing atau warga negara asing melalui pasar modal dalam negeri atau pemilikan langsung atau pasar modal dalam negeri.
- h. Izin usaha PMA ditetapkan selama 30 tahun dimulai sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usaha dan dapat diperbaharui sepanjang perusahaan masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,

perseorangan warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.⁸¹ Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, dan pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyebutkan, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal asing tersebut maka akan timbul kepemilikan asing.⁸²

Perusahaan Indonesia banyak yang menggunakan struktur kepemilikan yang terpusat. Struktur kepemilikan terpusat cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali.⁸³ Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang lebih baik. Hal ini menyebabkan pemegang saham non pengendali berada di dalam posisi yang paling lemah sehingga

⁸¹Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat (8)

⁸²Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat (3)

⁸³Thesa Refgia, Vince Ratnawati, dan Rusli, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus...", h. 547.

pemegang saham pengendali dapat menyalahgunakan hak atas kendalinya untuk kesejahteraannya sendiri.⁸⁴

5. Sistem Perpajakan dalam Islam

Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁸⁵

Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (*fay*), harta wakaf, barang temuan (*luqatah*), dan dari kekayaan alam. Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu *jizyah* (pajak kepala), *kharaj* (pajak tanah), dan *ushur* (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor).⁸⁶

Pertama, *jizyah* (pajak kepala). *Jizyah* adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas

⁸⁴*Ibid.*, h. 550.

⁸⁵M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 64.

⁸⁶Ria Achmadiyah, "Transaksi Rekayasa Pajak Pada *Transfer Pricing* ...", h. 707.

jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya.⁸⁷

Pemungutan *jizyah* disyaratkan dalam surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”*⁸⁸

Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa *jizyah* itu tidak dipungut kecuali dari orang-orang Ahli Kitab dan misalnya seperti orang-orang Majusi. Pendapat ini dianut oleh Imamasy-syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayatnya yang masyhur.⁸⁹ Sedangkan Abu Hanifah berpendapat *jizyah* dipungut dari semua non muslim yang bukan Arab, kecuali dari orang-orang Ahli Kitab. Sementara Imam Malik berpendapat bahwa diperbolehkan memungut *jizyah* dari semua orang kafir, Ahli Kitab, Majusi, penyembah berhala dan lain-lain.⁹⁰ *Jizyah* diwajibkan atas orang laki-laki, *baligh*, dan berakal. Dan yang dikenakan *jizyah* adalah orang yang termasuk golongan Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Besarnya

⁸⁷ *Ibid.*, h. 707.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, h. 119.

⁸⁹ M. Abdul Ghofar E M, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 4...*, h. 138.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 138.

kadar *jizyah* yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali.⁹¹

Kedua, *kharaj* (pajak tanah). *Kharaj* adalah uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak di atasnya yang harus ditunaikan. Tidak seperti *jizyah* yang dasar hukumnya ditentukan oleh *nas*, *kharaj* didasarkan pada *ijtihad*, karena *kharaj* ini tidak ditemui pada masa Rasulullah SAW tetapi mulai digali pada masa pemerintahan Umar bin Khatab ra.⁹² Menurut sebagian ulama, *kharaj* diambil dari orang kafir maupun dari orang muslim. Kadar *kharaj*, jumlah minimal dan maksimalnya ditetapkan oleh pemerintah dan dibayar sekali dalam setahun.⁹³

Ketiga, *ushur* (pajak perdagangan/bea cukai). *Ushur* menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, *ushur* berarti pajak yang dikenakan pada para pedagang asing yang melewati batas negara Islam dan pembayarannya dapat berupa uang dan barang.⁹⁴ Bea Cukai barang impor mulai dikenal atas keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota Dewan *Syura*-nya. Keputusan Umar ini bertitik tolak dari datangnya surat dari Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari yang menyatakan bahwa saudagar-saudagar muslim yang membawa barang dagangannya ke negara-negara yang tidak termasuk wilayah Islam dipungut bea

⁹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: edisi revisi*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 231.

⁹² Sjechul Hadi Permono, *Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Surabaya: CV. Aulia, 2004), h. 265.

⁹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h. 228

⁹⁴ Ria Achmadiyah, "Transaksi Rekayasa Pajak Pada *Transfer Pricing*...", h. 708.

masuk oleh pemerintah setempat sebesar 10%. Dengan demikian, dasar dari bea impor ini adalah *ijtihad*.⁹⁵

Pemerintahan pada masa Rasulullah *jizyah* (pajak) sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan islam sebagai bayaran jaminan keamanan dan ketika *jizyah* (pajak) tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, *tabi'in* hingga sekarang berbeda pendapat didalam menyikapinya. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya.⁹⁶

Menurut para ulama diperbolehkan untuk memungut pajak dengan alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah *ushulfiqh* menyebutkan bahwa: *Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib).⁹⁷

⁹⁵A. Djazuli, *Fiqih Siyasah...*, h. 237.

⁹⁶Dicki Hartanto, *Manajemen Keuangan Perusahaan Tinjauan Integratif*, (Pekanbaru: CV. MPS, 2014), h. 110.

⁹⁷Dicki Hartanto, *Manajemen Keuangan...*, h. 119.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk mengetahui apakah ada penelitian atau kajian terdahulu berkaitan dengan penelitian ini. Adapun hasil-hasil penelitian sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel (Y) dan (X)	Hasil
Diah Fitri, Nur Hidayat T. Arsono (2019)	<i>The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision</i>	<i>Transfer Pricing</i> (Y) Manajemen Pajak (X1), Mekanisme Bonus (X2), Kepemilikan Asing (X3)	Manajemen pajak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Mekanisme bonus berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, Victorina Z. Tirayoh (2018)	Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015	<i>Transfer Pricing</i> (Y) Pajak (X1), Kepemilikan Asing (X2)	pajak berpengaruh terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> , sedangkan variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> .
Thesa Refgia (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan	Pajak (X1), Mekanisme Bonus (X2), Ukuran Perusahaan (X3), Kepemilikan Asing (X4), <i>Tunneling</i>	Pajak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , kepemilikan asing

	Kimia Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)	<i>Incentive</i> (X5)	berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
Anita Wahyu Indrasti (2016)	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, <i>Bonus Plan</i> dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)	<i>Transfer Pricing</i> (Y) Pajak (X1), Kepemilikan Asing (X2), <i>Bonus Plan</i> (X3), <i>Debt Covenant</i> (X4)	Pajak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , Kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>Bonus plan</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>Debt covenant</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
Zerni Melmusi (2016)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	<i>Transfer Pricing</i> (Y) Pajak (X1), Mekanisme Bonus (X2), Kepemilikan Asing (X3), Ukuran Perusahaan (X4)	Pajak tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> . Secara simultan Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan ukuran Perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .

Hasil tinjauan pustaka terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian, berikut merupakan perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Diah Fitri, Nur Hidayat dan T. Arsono tahun 2019 dengan judul penelitian *The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision*. Penelitian ini menggunakan variabel *transfer pricing*, manajemen pajak, mekanisme bonus dan kepemilikan asing dengan menggunakan sampel sebanyak 76 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014⁹⁸. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana letak perbedaannya terletak pada variabel independen dimana peneliti saat ini menggunakan 2 variabel independen yaitu pajak dan kepemilikan asing, selain itu perbedaannya terletak pula pada sampel penelitian dimana penelitian saat ini menggunakan 7 sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2014-2018.
2. Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, dan Victorina Z. Tirayoh tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Penelitian ini

⁹⁸Diah Fitri, Nur Hidayat dan T. Arsono, “*The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision*”, *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1 (2019), h. 39

menggunakan variabel *transfer pricing*, pajak dan kepemilikan asing. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 141 perusahaan sektor manufaktur dan dengan menggunakan metode *purposive sampling* melalui kriteria-kriteria yang telah ditentukan, diperoleh 27 perusahaan sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu arsip laporan keuangan tahunan perusahaan untuk periode pelaporan tahun 2013-2015 yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan menggunakan metode adalah regresi linear berganda⁹⁹. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana letak perbedaannya terletak pada terletak pada sampel penelitian dimana penelitian saat ini menggunakan 7 sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2014-2018.

3. Thesa Refgia tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). Penelitian ini menggunakan variabel *transfer pricing*, pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* dengan 52 sampel perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014¹⁰⁰. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian

⁹⁹Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, Victorina Z. Tirayoh, “Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015”, *Jurnal EMBA*, Vol. 5 No. 2 (2017), h. 2673.

¹⁰⁰Thesa Refgia, Vince Ratnawati, dan Rusli, “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus ...”, h. 553.

sebelumnya dimana letak perbedaannya terletak pada variabel independen dimana peneliti saat ini menggunakan 2 variabel independen yaitu pajak dan kepemilikan asing, selain itu perbedaannya terletak pula pada sampel penelitian dimana penelitian saat ini menggunakan 7 sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2014-2018.

4. Anita Wahyu Indrasti tahun 2016 dengan judul penelitian Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, *Bonus Plan* dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*. Penelitian ini menggunakan variabel *transfer pricing*, pajak, kepemilikan asing, *bonus plan* dan *debt covenant* dengan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sampel akhir 26 perusahaan dalam 104 pengamatan dari 2012-2015. Teknik analisis yang digunakan adalah *binary logistic regression*¹⁰¹. Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana letak perbedaannya terletak pada variabel independen dimana peneliti saat ini menggunakan 2 variabel independen yaitu pajak dan kepemilikan asing, selain itu perbedaannya terletak pula pada sampel penelitian dimana penelitian saat ini menggunakan 7 sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2014-2018.
5. Zerni Melmusi tahun 2016 dengan judul penelitian Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap

¹⁰¹Anita Wahyu Indrasti, "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing...", h. 349.

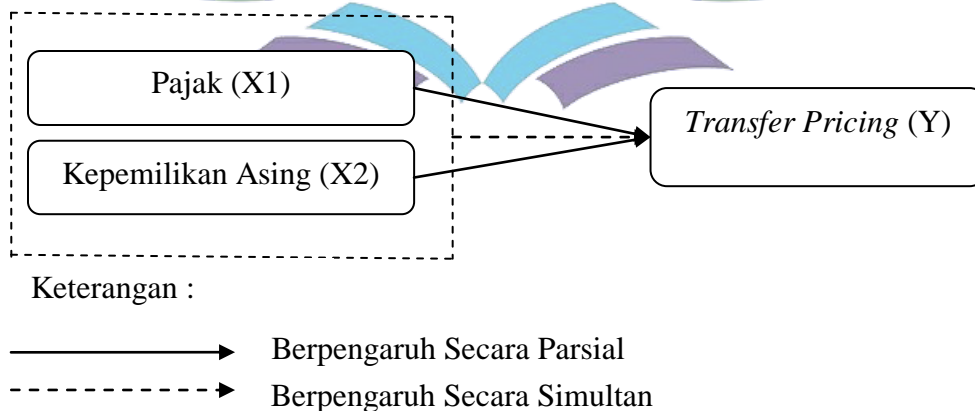
Transfer Pricing pada Perusahaan yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index Dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan variabel *transfer pricing*, pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan dengan sampel sebanyak 14 perusahaan dari 30 perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan *Cross-section random effects*¹⁰². Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana letak perbedaannya terletak pada variabel independen dimana peneliti saat ini menggunakan 2 variabel independen yaitu pajak dan kepemilikan asing, selain itu perbedaannya terletak pula pada sampel penelitian dimana penelitian saat ini menggunakan 7 sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2014-2018.

¹⁰²Zerni Melmusi, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus..., h 3.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan yang pada dasarnya merupakan gambaran secara sistematis dari kinerja dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.¹⁰³ Kerangka berpikir dirancang agar dapat lebih memahami tentang konsep dari penelitian yaitu menganalisis pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* karena kerangka berpikir merupakan suatu hubungan dari konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir terdiri dari variabel dependen dan variabel independen dari sebuah penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori diatas maka diperoleh kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2
Kerangka Berpikir

Sumber : Data diolah sendiri (2020)

¹⁰³ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 88.

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan pada penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.¹⁰⁴ Penentuan hipotesis sendiri berdasarkan pada kajian teoritis, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Pajak merupakan sumbangan wajib rakyat kepada kas negara berlandaskan undang-undang dan dipaksakan pemungutannya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk membiayai pengeluaran Negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum.¹⁰⁵

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan sebagai pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa.¹⁰⁶ Namun jika dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pemerintah dan para pengusaha memiliki dua persepsi yang berbeda. Pemerintah berusaha untuk

¹⁰⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 64.

¹⁰⁵Adrian Sutedi, *Hukum...*, h. 2.

¹⁰⁶Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan...*, h. 4.

mendapatkan penerimaan pajak semaksimal mungkin maka para pengusaha berusaha untuk membayarkan pajak seminimal mungkin.¹⁰⁷

Perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Motivasi pajak dalam *transfer pricing* pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi.

Semakin tinggi tarif pajak dalam suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi *transfer pricing* untuk penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Anisa Sheirina Cahyadi bersama Naniek Noviari¹⁰⁸, Evan Maxentia Tiwa bersama David P.E. Saerang dan Victorina Z. Tirayoh¹⁰⁹, Thesa Refgia bersama Vince Ratnawati dan Rusli¹¹⁰, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hal ini menunjukkan beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Dalam praktik bisnis, umumnya manajer akan senantiasa berusaha

¹⁰⁷Dinda Fali Rifan, “Analisis Penerapan *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak”, *Jurnal Fidusia*, Vol. 2 No. 1 (2019), h. 32.

¹⁰⁸Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari, “Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, Profitabilitas, Dan *Leverage* Pada Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 24 No. 2 (2018), h. 1468.

¹⁰⁹Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, Victorina Z. Tirayoh, “Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing...”, h. 2673.

¹¹⁰Thesa Refgia, Vince Ratnawati, dan Rusli, “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus ...”, h. 553.

untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Maka berdasarkan uraian tersebut rumusan hipotesis yang diajukan :

H₁ : Pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing*.

2. Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Kepemilikan Asing adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing atau yang berstatus luar negeri.¹¹¹ Di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terpusat, struktur kepemilikan yang terpusat cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham dominan dibandingkan dengan yang lainnya.¹¹²

Pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga di bawah pasar. Hal tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali.¹¹³

¹¹¹Thesa Refgia, Vince Ratnawati, dan Rusli, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus...", h. 543.

¹¹²Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang, Victorina Z. Tirayoh, "Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing...", h. 2668.

¹¹³Diah Fitri, Nur Hidayat dan T. Arsono, "*The Effect of Tax Management*...", h. 39

Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin kuat maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah *transfer pricing*.

Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Diah Fitri bersama Nur Hidayat dan T. Arsono¹¹⁴, Thesa Refgia bersama Vince Ratnawati dan Rusli¹¹⁵, dan Anita Wahyu Indrasti¹¹⁶ hasilnya menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan kebijakan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan :

H₂ : Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing*.

¹¹⁴Diah Fitri, Nur Hidayat dan T. Arsono, "*The Effect of Tax Management...*", h. 46.

¹¹⁵Thesa Refgia, Vince Ratnawati, dan Rusli, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus...", h. 553.

¹¹⁶Anita Wahyu Indrasti, "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing...", h. 369.

3. Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat terhadap negara, pajak juga merupakan sumber utama pendapatan negara. Ketika tarif pajak semakin tinggi dalam suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin kuat maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah *transfer pricing*. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diah Fitri bersama Nur Hidayat dan T. Arsono¹¹⁷, Thesa Refgia bersama Vince Ratnawati dan Rusli¹¹⁸, dan Anita Wahyu Indrasti¹¹⁹ hasilnya menyatakan bahwa pajak dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Maka hipotesis yang diajukan :

H₃ : Pajak dan Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing*.

¹¹⁷Diah Fitri, Nur Hidayat dan T. Arsono, "*The Effect of Tax Management...*", h. 46.

¹¹⁸Thesa Refgia, Vince Ratnawati, dan Rusli, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus...", h. 553.

¹¹⁹Anita Wahyu Indrasti, "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing...", h. 369.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadiyah, Ria, Transaksi Rekayasa Pajak Pada *Transfer Pricing* Menurut Hukum Islam, *Jurnal Maliyah*, Vol. 3 No. 2, 2013.
- Aristeus, Syprianus, *Penelitian Hukum Tentang Peranan Hukum Investasi Di Indonesia Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
- Azim Novriansa, “Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi *Transfer Pricing*” (On-line), tersedia di: <https://news.ddtc.co.id>, (14 Oktober 2019).
- Cahyadi, Anisa Sheirina, dan Naniek Noviari, Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 22 No. 3, 2018.
- Chandrarin, Grahita, *Metode Riset Akuntansi*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017.
- Chen, C. X., Lu, H., dan Sougiannis, T, *The Agency Problem, Corporate Governance, and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs. Contemporary Accounting Research*, 29(1), 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2016.
- Djazuli, A., *Fiqih Siyasah: edisi revisi*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Edi Suwiknyo, “Potensi Penerimaan Negara: Sektor SDA Rawan Praktik Pelanggaran” (On-line), tersedia di: <https://m.bisnis.com>, (30 Juli 2019).
- Fahmi, Irham, *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Fitri, Diah, Nur Hidayat, dan T. Arsono, *The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision*, *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Ghofar, M. Abdul dan Abdurrahim Mu'thi, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 5*, Bogor:

- Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono, *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10*, Semarang : UNDIP, 2018.
- Govindarajan and Anthony, *Management Control System*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Halim Rachmat, Radhi Abdul, Pajak, Mekanisme Bonus Dan *Transfer Pricing*, *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Hartanto, Dicki, *Manajemen Keuangan Perusahaan Tinjauan Integratif*, Pekanbaru: CV. MPS, 2014.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat dan Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Wastan Wahyu, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan, Pengaruh Pajak Dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017, Vol. 15 No. 1, 2019.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7. Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, 2009.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 15 (Revisi 2009). Investasi Pada Entitas Asosiasi, 2009.
- Indrasti, Anita Wahyu, Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, *Bonus Plan* dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*, *Profita* , Vol. 9 No. 3, 2016.
- Jafri, Hasan Effendi, dan Elia Mustikasari, Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunnneling Incentive* Dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Memiliki Hubungan Istimewa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016, *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2018.

- Jensen, Michael C. and William H. Meckling, *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics* 3. 1976.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2018" (On-line), tersedia di: www.kemenkeu.go.id, (30 Maret 2019).
- Khotimah, Siti Khusnul, Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017), Vol. 1 No. 1, 2018.
- Kurniawan, Albert, *Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mangoting, Yenni, Aspek Perpajakan Dalam Praktek *Transfer Pricing*, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 2 No. 1, 2000.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2013.
- Marfuah, Marfuah, dan Andri Puren Noor Azizah, Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive Dan Exchange Rate* Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol. 18 No. 2, 2014.
- Melmusi, Zerni, Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index, *Jurnal EKOBISTEK*, Vol. 5 No. 2, 2016.
- Mispiyanti, Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 16, No. 1 2015.
- Monica Wareza, "Mengenal Lebih Dekat Indeks Saham Syariah". (On-line), tersedia di <https://cnbcindonesia.com> , (25 Ferbruari 2018)
- Nuradila, Ratna Felix, dan Raden Arief Wibowo, *Tax Minimization* Sebagai Pemoderasi Hubungan Antara *Tunneling Incentive, Bonus Mechanism Dan Debt Covenant* Dengan Keputusan *Transfer Pricing*, *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Nurul Julaikah, "Hampir Semua Perusahaan Asing Akali Bayar Pajak". (On-line), tersedia di <https://merdeka.com>, 18 Maret 2014

Organisation for Economic Co-operation and Development, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, Paris France: OECD, 2010.

Organisation for Economic Co-operation and Development Rilis Statistik MAP 2018, "Kasus Baru Transfer Pricing Terus Naik" (On-line), tersedia di : <https://news.ddtc.co.id> , (16 September 2019).

Panjalusman, Paskalis A, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan, Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 6 No. 2, 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/ atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaanya.

Permono, Sjechul Hadi, *Islam dalam Lintasan Sejarah*, Surabaya: CV. Aulia, 2004.

Pohan, Chairil Anwar, *Manajemen perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

- Prasetyo, Dwi Sunar, *Panduan Lengkap Tata Cara dan Perhitungan Pajak Penghasilan*, Yogyakarta: Laksana Resmi Siti, 2013.
- Putri, Vidiyanna Rizal, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia, *DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 20, No. 1, 2019.
- Putri, Wika Arsanti, Prinsip Kewajaran Dan Dokumen Sebagai Penangkal Kecurangan, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 6 No. 1, 2018.
- Refgia, Thesa, Vince Ratnawati, dan Rusli, Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014), *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 4 No. 1, 2016.
- Rezky, Machfirah Aplilia dan Fachrizal, Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Multinationality* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*, *JIMEKA*, Vol. 3 No. 3, 2018.
- Rifan, Dinda Fali, Analisis Penerapan *Tunneling Incentive* Dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak, *Jurnal Fidusia*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Rita Purnamasari, “Sumber Daya Alam (SDA) Kita dikuasai Negara Asing” (Online), tersedia di: www.kompasiana.com, (20 Oktober 2019).
- Sarwono, Jonathan, *Prosedur-Prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi dan Tesis dengan Eviews*, Yogyakarta: Gava Media, 2016.
- Septriadi, Darussalam, Danny, B. Bawono Kristiaji, *Transfer Pricing: Ide, Strategi dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*, Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- , *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2016,
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharto, Buana Girisuta dan Arry Miryanti, *Perekyasaan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2004

Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Tiwa, Evan Maxentia, David P.E. Saerang, Victorina Z. Tirayoh, Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015, *Jurnal EMBA*, Vol. 5 No. 2, 2017.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat (8).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4).

Wafiroh, Novi Lailiyul dan Niken Nindya Hapsari, Pajak, *Tunneling Incentive* Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan *Transfer Pricing*, *El-Muhasaba*, Vol. 6 No. 2, 2015.

Wihdan, "Apa itu Indeks Saham Syariah (ISSI)". (On-line), tersedia di: <https://republika.co.id>, (27 November 2019).

Yulia, Aida, Nurul Hayati dan Rulfah M, *The Influence of Tax, Foreign Ownership and Company Size on the Application of Transfer Pricing in Manufacturing Companies Listed on IDX during 2013-2017*, *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 9 No. 3, 2019.